

Identifikasi Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Pasca Implementasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) di RW 11 Kampung Badran, Kota Yogyakarta

Identification of the Quality Improvement of Settlement Infrastructure After the Implementation of the Children-Friendly Village Program (KRA) in RW 11 Kampung Badran, Yogyakarta City

Daniel Kristian Nugroho^{1*}, Kusumastuti^{1,2}, Paramita Rahayu^{1,2}

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi. e-mail: danielkristiannu@gmail.com

(Diterima: 5 Januari Desember 2023; Disetujui: 20 Februari 2023)

Abstrak

Permukiman kumuh adalah sebuah fenomena dan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh kota, termasuk Kota Yogyakarta. Meskipun menyandang gelar sebagai kota budaya dan kota pendidikan, fenomena permukiman kumuh tetap eksis di Kota Yogyakarta. Kampung Badran adalah salah satu kampung di Kota Yogyakarta yang masih mengalami status sebagai permukiman kumuh, ditinjau dari indikator kepadatan bangunan, kesehatan, dan kondisi sosial masyarakat. Selain permasalahan permukiman kumuh, Kampung Badran juga menyandang gelar sebagai kampung preman, yang membentuk permasalahan yang kompleks di kampung ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekumuhan di kampung ini. Kampung Ramah Anak (KRA) adalah salah satu program yang diinisiasi, yang tidak hanya mengatasi permasalahan fisik terkait permukiman kumuh, namun juga permasalahan sosial dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak di kampung tersebut. Inisiasi program KRA di RW 11 Kampung Badran menggunakan pendekatan partisipatif, dimana pemerintah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (RT, RW, dan kelompok-kelompok masyarakat), dan seluruh masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak melalui penyediaan instrumen KRA baik secara kelembagaan maupun infrastruktur. Semenjak adanya program KRA ini, berbagai pendanaan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 juga semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dengan melihat peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di RW 11 Kampung Badran pasca diimplementasikannya program KRA. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang menekankan pada realitas dan proses suatu fenomena dapat terjadi agar mampu memberikan gambaran khusus terkait perubahan infrastruktur yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur di RW 11 Kampung Badran mengalami peningkatan kualitas, ditandai peningkatan kondisi dan perubahan yang terjadi pada berbagai sarana dan prasarana. Adanya peningkatan kualitas infrastruktur ini berpengaruh besar terhadap penanganan kekumuhan di RW 11 Kampung Badran, terutama terkait dengan indikator penyediaan sarana prasarana, kesehatan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.

Kata kunci: infrastruktur; Kampung Badran; kampung preman; Kampung Ramah Anak; kumuh

Abstract

Slum settlement is a phenomenon and a problem faced by almost all cities, including the city of Yogyakarta. Even though Yogyakarta holds a title as a city of culture and city of education, the phenomenon of slum settlement still exists in the city. Kampung Badran is one of the villages in the city of Yogyakarta which is still experiencing the status of a slum settlement, from indicators of building density, health, and social conditions of the community. Apart from the problem of slum settlements, Kampung Badran also holds the title of being thug village, which creates complex problems in this village. Numerous efforts have been made by the community and government in overcoming the problem of slums in this village. Child Friendly Village (Kampung Ramah Anak or KRA) is one program initiated not only to address physical problems related to slum settlements, but also social problems within them, in fighting for the fulfillment of children's rights in the village. The initiation of the KRA program in RW 11 Kampung Badran uses a participatory approach, in which the government collaborates with stakeholders (RT, RW, and community groups), and the whole community through the provision of KRA instruments both institutionally and in infrastructure. Since the existence of this KRA program, various funding efforts to improve the quality of infrastructure in RW 11 have also increased. This study aims to identify the changes that have occurred by looking at the improvement in the quality of infrastructure in RW 11 Kampung Badran after the implementation of the KRA program.

This research was conducted using a qualitative method with descriptive analysis approach that emphasizes on the reality and process a phenomenon can occur, in order to be able to provide a specific picture regarding the changes in infrastructure. The results of this study indicate that the quality of infrastructure in RW 11 Kampung Badran has improved, marked by improved conditions and changes that have occurred in various facilities and infrastructure. This increase in the quality of infrastructure has a major impact on the handling of slums in RW 11 Kampung Badran, especially related to the indicators of infrastructure provision, environmental health, and socio-economic conditions.

Keywords: *friendly child village; infrastructure; Kampung Badran; slum; thug village*

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi telah menjadi tantangan bagi perkembangan kota, baik kota kecil, menengah, maupun kota-kota besar. Menurut data World Urbanization Prospect yang dirilis oleh the United Nations pada tahun 2018, rata-rata pertumbuhan populasi kawasan perkotaan di dunia adalah sebesar 10%, bahkan pertumbuhan populasi kota-kota di Indonesia sudah mencapai angka 12,86%. Tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan populasi di kawasan perdesaan yang angkanya -0,98% (UN, 2018). Resesi jumlah penduduk di kawasan perdesaan ini juga linear dengan kondisi di Indonesia dimana pertumbuhannya mencapai -1,46%. Kondisi ini berimplikasi pada tidak terkendalinya pertambahan dan migrasi penduduk menuju kota besar. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus dan tidak terkendali, serta tidak dibarengi dengan penyediaan hunian dan lapangan pekerjaan, akan menimbulkan permasalahan bagi kota tersebut. Kemiskinan, kriminalitas, dan tumbuhnya permukiman kumuh (*slum area*), adalah konsekuensi dari fenomena urbanisasi tersebut (Harahap, 2013). Adanya fenomena-fenomena tersebut tentu menimbulkan citra negatif terhadap sebagian maupun seluruh wilayah kota.

Setyowati (2016) menyatakan bahwa Kampung Badran di Kota Yogyakarta adalah salah satu kampung yang memiliki citra buruk sebagai Kampung Preman. Citra buruk ini dimulai dari adanya fenomena tumbuhnya permukiman kumuh dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat pada tahun 1980-an. Hal ini berimplikasi pada munculnya preman-preman yang tidak memiliki pilihan pekerjaan sehingga menjadikan kampung ini memiliki citra negatif di kacamata masyarakat Yogyakarta. Tumbuhnya fenomena kampung preman tersebut selain didorong oleh faktor ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor sosial, diantaranya karena adanya tokoh penggerak. Kampung Badran pada awalnya merupakan kawasan pemakaman etnis Tionghoa (Bong) yang menjadi area perjudian kala itu. Tokoh penggerak pada kala itu menjadi penguasa keamanan yang mendapat jatah dari para pemain judi atas tugasnya, hingga keluar masuk penjara dalam hitungan bulan menjadi hal (Rudi dalam Haryanto, 2013).

Selain pengaruh faktor sosial dan ekonomi, citra negatif kampung preman di Kampung Badran diperkuat keadaan kampung yang merupakan kawasan permukiman kumuh. Kekumuhan di kampung ini dipicu oleh pertumbuhan perumahan secara organik di area yang merupakan bekas pemakaman Tionghoa. Kekumuhan ini dinyatakan secara formal dalam SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kekumuhan ini meliputi beberapa aspek, seperti kesehatan, tata bangunan, dan kondisi sosial masyarakat, ditambah kategori penghasilan masyarakat masih tergolong kelas sosial menengah ke bawah (MBR). Aspek-aspek tersebut menjadikan masyarakat Kampung Badran rentan menghadapi masalah sosial.

Meskipun merupakan permukiman kumuh dengan citra buruk sebagai kampung preman, RW 11 Kampung Badran terus berbenah dalam mengupayakan lingkungan permukiman yang lebih baik. Upaya ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Devas (1981) menyatakan bahwa proses perubahan permukiman merupakan suatu proses hierarkis, kepala pemerintahan pada masing-masing level memegang peranan penting, terlebih pemangku kepentingan pada level bawah (RT dan RW) yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan perubahan permukiman turut dipengaruhi oleh tingkat konsultasi masyarakat kepada *stakeholder* akan apa yang mereka butuhkan. Hal serupa diutarakan oleh Silas (1992), bahwa proses perubahan pemukiman berkaitan dengan kemitraan atau kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat berperan dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi terkait lingkungan tempat tinggalnya dan pemerintah berperan dalam menyediakan pendanaan, standar, dan panduan dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.

Awal tahun 2000-an menjadi titik balik RW 11 menuju proses perkembangan, baik secara kelembagaan maupun infrastruktur. Pemimpin memegang peran dan pengaruh kuat dalam memobilisasi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Upaya ini juga mendapat dukungan berbagai pihak mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta, hingga pemerintah dalam mencapai kondisi lingkungan permukiman yang lebih baik. Hingga akhirnya pada tahun 2011, dilakukan inisiasi program Kampung Ramah Anak (KRA) sebagai respon kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta. Program KRA ini berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam klaster KRA, dimana klaster-klaster ini berkaitan erat dengan aspek kelembagaan dan infrastruktur. Pemenuhan hak anak akan tercipta apabila penguatan terhadap kelembagaan serta penyediaan infrastruktur permukiman terpenuhi. Hal ini terbukti, dimana dengan kondisi masyarakat dan kelembagaan yang dinilai sudah mandiri ini mampu menjalankan program yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan baik. Semenjak adanya program KRA ini, berbagai pendanaan dan program-program peningkatan kualitas permukiman juga mulai masuk di RW 11 Kampung Badran. Pelaksanaan Program KRA di RW 11 Kampung Badran dinilai telah mampu memberikan perubahan terhadap kondisi permukiman. Berdasarkan latar belakang kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran pasca implementasi program KRA.

2. KAJIAN TEORI

2.1 DEFINISI PERMUKIMAN

Permukiman terbentuk oleh adanya tuntutan terhadap kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan vital seperti akses terhadap air bersih, udara, makanan, dan keamanan. Permukiman berfungsi untuk memfasilitasi interaksi antarmanusia, diciptakan untuk mengakomodasi dan membentuk nilai-nilai kolektif, keinginan, dan peraturan bersama (Villagomez, 2018). Kovacic & Giampietro (2017) menyatakan bahwa permukiman adalah sebuah kawasan berpenghuni yang memiliki karakter fisik dan institusional sehingga penyelenggaraan kehidupan bisa berjalan optimal. Diutarakan juga oleh Silas (1992) bahwa permukiman adalah sebuah teritorial habitat dimana penduduknya masih dapat melaksanakan kegiatan biologis, sosial, ekonomis, politis, dan dapat menjamin kelangsungan lingkungan yang seimbang dan serasi. Permukiman merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya (Kurniasih, 2007).

Menurut Hariyani, Usman, & Kurniawan (2018), permukiman adalah sebuah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang dibangun oleh infrastruktur yang merupakan komponen dari sistem fisik permukiman itu sendiri. Lahan merupakan aspek paling penting dari wilayah permukiman, yang lalu didukung oleh hunian, sistem transportasi, dan berbagai fasilitas. Diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa permukiman adalah lingkungan tempat tinggal, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal maupun lingkungan hunian yang mendukung penghidupan bagi penghuninya.

2.2 KOMPONEN FISIK PERMUKIMAN

Doxiadis (1970) menyatakan bahwa komponen permukiman ditujukan ke dalam bagan hubungan manusia dengan lingkungannya. Komponen ini dibagi ke dalam komponen fisik, yaitu *network* (jaringan), *nature* (karakter fisik alam), dan *shell* (bangunan atau tempat tinggal), dan juga terdapat komponen nonfisik yaitu *society* (komunitas) dan *man* atau manusia itu sendiri. Komponen fisik permukiman menurut Doxiadis (1970) dirincikan sebagai mana pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen Fisik Permukiman

<i>Nature</i>	<i>Shell</i>	<i>Network</i>
Geologi	Rumah	Jaringan air bersih
Topografi	Fasilitas sosial	Jaringan listrik/energi
Hidrologi	Fasilitas ekonomi	Jaringan transportasi
Tanaman	Fasilitas rekreasi	Jaringan komunikasi
Iklim	Fasilitas administrasi	Jaringan drainase
		Jaringan persampahan
		Sanitasi

Sumber: Doxiadis (1970)

Dalam buku "The Law of Settlement" sebagai respon terhadap penelitian Doxiadis, Villagomez (2018) menyatakan beberapa komponen fisik permukiman meliputi: (1) lokasi, berkaitan dengan kondisi geografis dan topografi bentang alam suatu permukiman terbentuk; (2) ukuran, berkaitan dengan jumlah penduduk dan dampaknya terhadap penyediaan kebutuhan mereka; (3) fungsi, berkaitan dengan peran permukiman tersebut; (4) struktur berkaitan dengan hirarki, kesatuan, dan konektivitas penduduk di dalamnya; dan (5) bentuk dari permukiman itu sendiri. Menurut Kaseke, Pakasi, & Ngangi (2017), komponen fisik suatu permukiman meliputi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Disampaikan juga menurut Annas, Soemitro, & Santoso (2018) bahwa kualitas komponen fisik permukiman dinilai melalui kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi jaringan air bersih, kondisi jaringan air limbah, pengelolaan

persampahan, kondisi bangunan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan ketersediaan RTH. Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di dalam Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 yang menjelaskan komponen permukiman layak huni dan berkelanjutan terkait fisik, antara lain kondisi bangunan hunian, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan bahaya kebakaran, dan ruang terbuka publik (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintahan Rakyat, 2016).

2.3 PERUBAHAN PERMUKIMAN

Perubahan yang terjadi di masyarakat ada yang bersifat sosial dan fisik. Perubahan sosial mencakup perubahan yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antarindividu dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi perubahan demografi, munculnya kebudayaan, konsensus, program yang disepakati bersama, dan *social movement* (Horton, 1999). Di sisi lain, ada perubahan yang bersifat fisik, dimana perubahan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya perubahan sosial di masyarakat. Menurut Villagomez (2018), perubahan permukiman terjadi seiring berjalannya waktu dengan tujuan untuk mengembangkan fungsi dan tujuan masyarakat sebagai respon dari perkembangan industri, teknologi, budaya, dan aspek lain yang sangat kompleks. Hendrarto (1997) menyatakan bahwa perkembangan kota atau suatu wilayah yang pesat harus dibarengi dengan proses pembangunan yang dilakukan. Adanya permasalahan suatu wilayah seperti kemacetan, urbanisasi, pelayanan dasar, permukiman kumuh, dan sebagainya sangat membutuhkan tata kelola wilayah yang baik dalam kaitannya dengan perubahan fisik.

Diutarakan oleh Fransen, Hati, Nyumba, & van Tuijl (2023), proses perubahan permukiman menjadi lingkungan yang layak huni dan tempat bekerja yang nyaman dipengaruhi oleh adanya relasi sosial dan rasa kepemilikan yang melibatkan pemangku kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut Sibyan (2020), mekanisme perubahan permukiman meliputi pengumpulan data, sosialisasi, pembentukan kelompok kerja, verifikasi, pemilihan lokasi, pengadaan lahan, dan konstruksi. Sibyan (2020), juga menyatakan bahwa keberhasilan perubahan permukiman membutuhkan sudut pandang dari pemangku kepentingan untuk melihat sebuah kawasan kumuh sebagai sebuah entitas sosial yang sama-sama memiliki hak terhadap akses hunian yang memadai dan lingkungan yang sehat. Perubahan permukiman juga perlu untuk menitikberatkan pada pendekatan perencanaan partisipatif dan kolaboratif untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan dukungan terhadap perencanaan.

Proses perubahan permukiman yang efektif dan berhasil idealnya melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka atas lingkungannya sendiri, dan masyarakat sendirilah yang turut menyediakan sumber daya dalam proses perubahan tersebut (Devas, 1981). Devas (1981) menyatakan bahwa proses perubahan permukiman merupakan suatu proses hierarkis, kepala pemerintahan pada masing-masing level memegang peranan penting, terlebih pemangku kepentingan pada level bawah, seperti RT dan RW yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dijelaskan oleh Silas (1992) dalam studi kasus *Kampung Improvement Program* (KIP) di Surabaya, bahwa keberhasilan perubahan permukiman turut dipengaruhi oleh tingkat konsultasi masyarakat kepada *stakeholder* akan apa yang mereka butuhkan. Ia juga menyatakan bahwa konsultasi rutin antara pemangku kepentingan dengan masyarakat menjadikan masyarakat merasa dilibatkan dalam mewujudkan lingkungan tempat tinggal mereka ke arah yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi terdorong dalam mengorganisasikan komunitas mereka selama proses perencanaan pembangunan dalam menciptakan forum untuk menampung ide dan gagasan masyarakat terhadap apa yang mereka butuhkan.

2.4 PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK (KRA)

Child Friendly City Initiative (CFCI) adalah sebuah program yang diprakarsai oleh UNICEF sejak tahun 2004 dalam rangka menyediakan kerangka tata kelola untuk membangun kota dan komunitas ramah anak. Menurut Brown et al. (2019), CFCI berdiri atas tuntutan kebutuhan akan kota yang sehat, dimana kota adalah suatu tempat yang melayani kebutuhan semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, pendapatan, status, atau etnis. Oleh karena itu, perencanaan kota berfokus pada perkembangan yang sehat bagi anak-anak untuk memberikan manfaat jangka panjang dan mempengaruhi masa depan, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial. Program CFCI di Indonesia direspon melalui program Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Himawati (2013) menyatakan bahwa Kampung Ramah Anak (KRA) dibangun oleh pemerintah kota untuk memfasilitasi kegiatan belajar, bermain, bersosialisasi di tengah masyarakat atas hak-haknya seperti pendidikan dasar, kesehatan, serta perlindungan khusus selain untuk mengurangi risiko-risiko kampung yang sebelumnya memperoleh stigma sebagai kampung yang memiliki sejarah kelam. Oleh karena itu, KRA sengaja digunakan untuk mengkonstruksi kembali kampung

dengan tujuan agar menjadi lebih nyaman, aman, dan kondusif bagi perkembangan anak. Keterlibatan secara aktif berbagai pihak masyarakat mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah wilayah setempat merupakan pendukung terbentuknya KRA.

Menurut petunjuk teknis KRA, KRA adalah suatu pembangunan yang berbasis masyarakat yang dilakukan mulai dari lingkup RW, mengintegrasikan antara sumber daya lokal masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam upaya untuk menghormati, menjamin, memenuhi, dan melindungi hak anak, serta menanggulangi resiko anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010). Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penilaian mandiri KLA didasarkan pada 24 indikator yang mencakup ke dalam 6 kluster KLA. Indikator KLA ini dalam implementasinya menjadi standar acuan bagi wilayah di bawahnya hingga pada level kampung, RW, dan RT. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui status wilayah ramah anak oleh masing-masing kabupaten/kota. Indikator-indikator KRA ini linier dengan teori Doxiadis mengenai komponen permukiman, dimana secara garis besar komponen ini berkaitan dengan komponen fisik (infrastruktur) dan komponen nonfisik.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan mengidentifikasi secara mendalam suatu fenomena yang terjadi (Somantri, 2005). Hal ini sesuai dengan kompleksitas dan kekhasan kondisi di lokasi penelitian RW 11 Kampung Badran terkait perubahan infrastruktur yang terjadi. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar pengambilan data di lapangan, dimana indikator yang diamati dalam penelitian ini berupa (1) persebaran, (2) kondisi, dan (3) perubahan dari komponen fisik yang ada di RW 11 Kampung Badran.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Sebagai pendukung, juga dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen yang diperoleh melalui arsip dokumen RW 11 Kampung Badran. Setelah data kualitatif ini dikumpulkan, data diolah menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2018), triangulasi data diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas suatu data dari berbagai subjek yang memiliki sudut pandang berbeda, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang valid.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) tahapan penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber. Selanjutnya dilakukan proses pemilahan data dan reduksi data. Hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, menemukan pola/tema, dan memfokuskan data dari berbagai data mentah yang diperoleh di lapangan. Setelah data terkumpul dan terkompilasi, peneliti melakukan analisis data sebagai pembahasan atas hasil yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan menyandingkan hasil dan teori yang sebelumnya telah disusun untuk melihat hasil identifikasi kualitas peningkatan infrastruktur yang ada. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan atas hasil yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM KAWASAN STUDI

RW 11 Kampung Badran secara administratif terletak di Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Secara administratif, RW 11 terbagi ke dalam 5 RT, yaitu RT 47, 48, 49, 50, dan 51. Pembagian RT ini didasarkan pada batas fisik yaitu jalan lingkungan. RW 11 Kampung Badran memiliki populasi yang cukup besar yaitu 1074 jiwa, dengan 342 KK, dan rata-rata anggota keluarga sebesar 3-4 jiwa. Mayoritas penduduk di RW 11 Kampung Badran menggantungkan hidup pada sektor ekonomi informal, dimana kelompok pekerjaan sebagai wirausaha memiliki jumlah yang paling besar. RW 11 Kampung Badran memiliki kondisi yang unik dan strategis karena dilewati oleh akses jalan kolektor yang cukup vital di Kota Yogyakarta, yaitu Jalan Tentara Rakyat Mataram. Kampung Badran juga dilewati oleh Kali Winongo yang membelah Yogyakarta menjadi bagian Timur dan Barat. Apabila melihat dari aksesibilitas, Kampung Badran cukup dekat dengan

landmark Kota Yogyakarta yaitu Tugu Jogja, Stasiun Tugu, dan Jalan Malioboro. Batas-batas RW 11 Kampung Badran dijabarkan dalam Tabel 2.

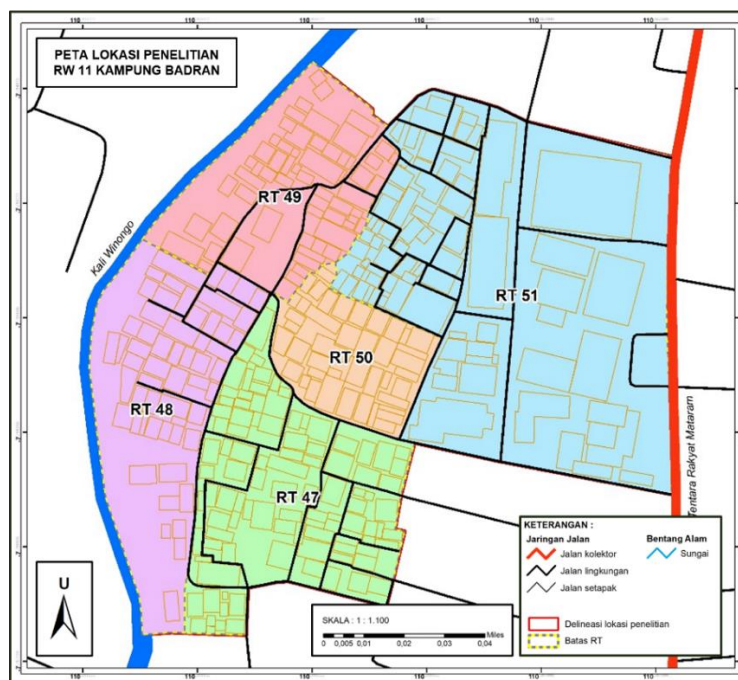
Tabel 2. Batas RW 11 Kampung Badran

Batas	Keberadaan Batas Fisik maupun Administratif
Utara	Kampung Pingit
Timur	Jalan Tentara Rakyat Mataram dan RW 12 Kelurahan Bumijo
Selatan	RW 10 Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Pringgokusuman
Barat	Kali Winongo dan Kelurahan Tegalrejo

RW 11 Kampung Badran merupakan permukiman kepadatan tinggi, dengan nilai rata-rata Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 85,4%. KDB wilayah RT yang berbatasan langsung dengan sungai (RT 47, 48, dan 49) adalah sebesar 91-100%, KDB RT 50 sebesar 81-90%, dan KDB RT 51 sebesar 71-80%. Terkait nilai jumlah lantai bangunan, RW 11 Kampung Badran didominasi oleh lantai bangunan sejumlah 1, namun untuk RT 51 sejumlah 1-3 dikarenakan didominasi oleh bangunan pemerintahan (lihat Gambar 1).

RW 11 Kampung Badran merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 118–141 mdpl dan didominasi oleh tanah dengan kelerengan yang cenderung datar kecuali daerah bantaran sungai yang konturnya cukup menurun. Kampung Badran memiliki curah hujan relatif sedang sebesar 2000–3000 mm/tahun. Karakteristik tanah di Kampung Badran cukup gembur dan memiliki karakteristik yang cocok untuk bercocok tanam, mengingat ketersediaan sumber air yang dekat dengan bantaran Kali Winongo. Namun, lokasi tersebut apabila dilihat dari kerawanan bencana cukup rentan terhadap potensi tanah longsor. Oleh karena itu, tanah di bantaran sungai dibangun talud/dinding penahan dari beton maupun bronjong untuk meminimalisir resiko bencana yang ada.

Secara aksesibilitas, meskipun dilewati oleh jalan kolektor, untuk bisa masuk ke dalam wilayah RT 11, akses jalannya cukup terbatas. Kampung Badran didominasi oleh gang sempit yang hanya bisa diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat sejumlah tiga ruas jalan lingkungan. Gambaran umum RW 11 Kampung Badran dijelaskan melalui peta pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian RW 11 Kampung Badran

4.2 IDENTIFIKASI PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

Identifikasi peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran tidak bisa dilihat secara eksplisit tetapi perlu dipahami rangkaian proses dari tumbuhnya permukiman. RW 11 Kampung Badran yang semula hamparan tanah pemakaman, berubah menjadi sarang premanisme, dan akhirnya tumbuh menjadi sebuah permukiman, yang tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah. RW 11 Kampung Badran tumbuh karena adanya pembangunan jalan kolektor

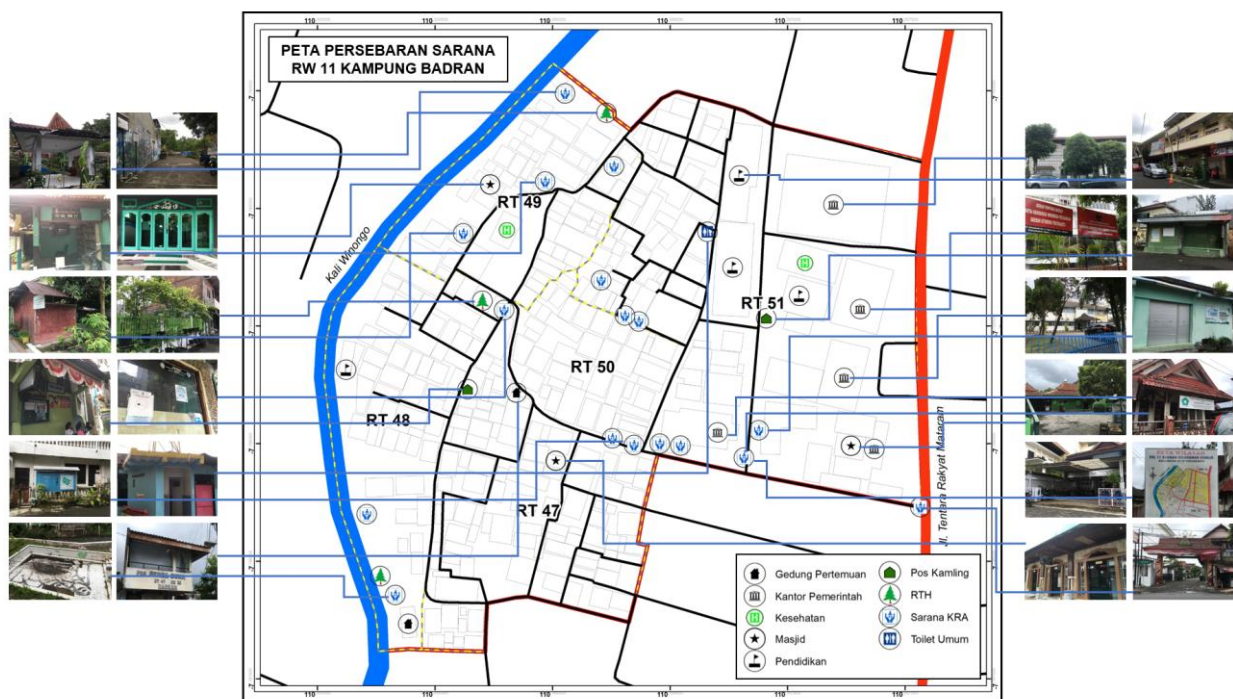
yaitu Jl. Tentara Rakyat Mataram dan kawasan perkantoran serta gedung pemerintahan. Memasuki tahun 2000-an, perkembangan infrastruktur mulai beralih dari yang dulunya dibangun oleh pemerintah menuju swadaya masyarakat. Perubahan kelembagaan dari periode ke periode yang berimplikasi pada perubahan infrastruktur menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan RW 11 Kampung Badran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Hendarto (1997) bahwa perubahan fisik merupakan suatu konsekuensi dari adanya perubahan sosial di masyarakat.

Adanya program Bank Sampah pada tahun 2009 merupakan salah satu program kelembagaan yang berperan dalam penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Bank sampah ini berperan dalam menunjang infrastruktur persampahan di RW 11 Kampung Badran, seperti penyediaan tempat sampah komunal di beberapa titik, bangunan bank sampah, dan pengelolaan sampah. Kelembagaan lain juga berperan dalam menopang penyediaan infrastruktur adalah sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Rumah Bambu, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Griya Rumpun. Lembaga-lembaga yang sama-sama bergerak di bidang pendidikan ini menopang adanya penyediaan infrastruktur berupa ruang belajar bagi masyarakat. Selain itu, juga terdapat Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang berperan dalam penyediaan infrastruktur kesehatan bagi anak-anak dan balita.

Dengan adanya berbagai infrastruktur yang dibangun dan mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk khususnya anak-anak, akhirnya program KRA mampu untuk diimplementasikan di RW 11 Kampung Badran. Infrastruktur-infrastruktur inilah yang turut menopang terpenuhinya kluster KRA di RW 11 Kampung Badran. Setelah program KRA ini dirilis pada tahun 2011, dampak terhadap penyediaan infrastruktur di RW 11 semakin terlihat. Infrastruktur utama yang menjadi kewajiban dari program KRA ini mulai muncul seperti: (1) papan informasi, (2) papan hak anak, (3) sarana kesehatan dan pendidikan layak anak, (4) ruang aktualisasi & kegiatan budaya untuk anak, serta (5) sarana pendukung permukiman yang ramah anak, seperti *traffic mirror*, *speed bump*, *railing* tangga di bantaran sungai, dan lain-lain.

Program KRA juga mampu menstimulasi pendanaan-pendanaan dari pemerintah dan sektor swasta untuk masuk, seperti dana dari Pemerintah Kota dalam program revitalisasi bantaran sungai, pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di bantaran sungai yang dilengkapi dengan gazebo, fasilitas bermain anak, dan kolam renang. Terdapat juga pendanaan dari program KOTAKU dalam perbaikan infrastruktur dasar, seperti sanitasi berupa penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, air bersih dengan penyediaan air minum mandiri, serta jaringan jalan berupa pembangunan paving mayoritas jalan lingkungan di RW 11 Kampung Badran.

Setelah dilakukan pemahaman mengenai konteks perubahan infrastruktur yang terjadi di RW 11 Kampung Badran, selanjutnya dilakukan identifikasi dari peningkatan kualitas infrastruktur dengan melihat indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu terkait dengan persebaran, kondisi, dan perubahan infrastruktur.



Gambar 2. Photo Mapping Persebaran Infrastruktur RW 11 Kampung Badran

4.2.1 Persebaran Infrastruktur

Peta persebaran dan detail dari masing-masing sarana infrastruktur bisa dilihat pada Gambar 2. Identifikasi mengenai persebaran infrastruktur dilakukan dengan memetakan titik-titik sarana dan prasarana yang ada di RW 11 Kampung Badran dengan metode *photo mapping*, yaitu dengan memberikan informasi tambahan berupa foto pada titik sarana tersebut. Hal ini bertujuan memberikan informasi yang lebih detail dan memberikan gambaran secara jelas mengenai penampakan sarana dan prasarana yang ada. Gambar 2, dapat diidentifikasi bahwa persebaran sarana di RW 11 Kampung Badran sudah merata pada seluruh kawasan sehingga dari keterjangkauan sudah mampu melayani seluruh kawasan. Infrastruktur yang ada juga sudah lengkap, yang bisa dilihat dengan terpenuhinya sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, RTH, dan sarana penunjang KRA.

4.2.2 Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur yang ada di RW 11 Kampung Badran mayoritas berada dalam kondisi yang cukup baik, mengingat Kampung Badran ini baru tumbuh dalam beberapa dekade terakhir. Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di RW 11. Adanya upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dari tahun ke tahun juga menjadi faktor pendorong infrastruktur agar ketersediaannya semakin lengkap dan kondisinya terjaga. Detail dari kondisi infrastruktur tersebut dijelaskan melalui Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi Infrastruktur RW 11 Kampung Badran

Jenis Infrastruktur	Jumlah	Deskripsi	Kondisi
Gedung Pertemuan	2	Gedung pertemuan yang ada di RW 11 Kampung Badran meliputi gedung serbaguna yang sekaligus adalah balai RW, serta balai RT yang baru dibangun di RT 47. Selain itu, terdapat gedung pemerintahan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) yang dapat digunakan untuk pertemuan.	Gedung pertemuan berada dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan, hanya saja balai RT 47 sedang dalam tahapan pembangunan sehingga masih terdapat beberapa material di dalam gedung.
Kantor Pemerintahan	5	Terdapat beberapa kantor pemerintahan, skala kota maupun provinsi, di RT 51 dan berbatasan langsung dengan Jalan Tentara Rakyat Mataram. Kantor pemerintahan ini meliputi kantor Kesbangpol, kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, kantor DPP, kantor DPD PDI DIY, serta kantor BK3S.	Kantor-kantor pemerintahan berada dalam kondisi yang cukup baik. Umur bangunan juga relatif masih muda dikarenakan baru dibangun tahun 1990-an hingga 2000an pasca pembangunan Jalan Tentara Rakyat Mataram.
Kesehatan	2	Sarana kesehatan yang ada di RW 11 Kampung Badran meliputi klinik serta Posyandu yang digunakan untuk pemberian gizi balita serta pemantauan kesehatan anak.	Sarana kesehatan berada dalam kondisi yang cukup baik dan terawat tetapi bangunan Posyandu masih menumpang pada salah satu rumah warga.
Masjid	3	RW 11 Kampung Badran memiliki masjid berjumlah 3, dimana 2 masjid merupakan masjid milik RW serta 1 masjid berada di wilayah kantor DPP.	Masjid yang ada di wilayah RW 11 Kampung Badran kondisinya sangat baik dan terawat.
Pendidikan	2	Sarana pendidikan di RW 11 yaitu Politeknik Kesehatan Karya Husada yang merupakan perguruan tinggi dengan skala pelayanan nasional, yang dibuktikan dengan banyaknya pendatang dari berbagai provinsi yang kost di wilayah RW 11. Terdapat PAUD yang berada di RT 48, sedangkan TK – SMA dilayani oleh sarana pendidikan yang jaraknya berdekatan dengan RW 11: TK terdapat di RW 10, SD terdapat di RW 9 dan 12, SMP dan SMA dilayani oleh berbagai sarana pendidikan di kota.	Sarana pendidikan yang ada di wilayah RW 11 yaitu PAUD lokasinya masih menumpang pada rumah warga yang cukup luas dan kondisinya baik. Untuk sarana pendidikan yang ada di sekitar wilayah RW 11 seperti TK, SD, SMP, dan SMA kondisinya juga sudah sangat baik.
Poskamling	2	Terdapat 2 bangunan Poskamling yang terdapat di RT 48 dan RT 51	Poskamling di RT 48 berukuran kecil dan menghalangi akses jalan lingkungan saat digunakan. Poskamling di RT 51 cukup baik dan terawat.

Jenis Infrastruktur	Jumlah	Deskripsi	Kondisi
RTH	2	Sarana RTH yang ada di RW 11 Kampung Badran berupa lapangan voli yang terletak di RT 49, lahan pertanian warga di RT 48, serta taman di RT 47	Sarana RTH berupa lapangan voli dan lahan pertanian warga berada dalam kondisi baik dan terawat karena sering digunakan. Taman di RT 47 kondisinya sangat terbengkalai karena kolam tersebut sudah ditutup semasa pandemi Covid-19, berbagai sarana pendukung di taman tersebut seperti gazebo dan <i>railing</i> juga sudah mulai rusak dan terkena vandalisme.
Sarana Pendukung KRA	19	Sarana pendukung kegiatan KRA merupakan sarana yang mendominasi di RW 11 Kampung Badran, dimana sarana ini berupa papan informasi, taman bermain, taman baca, kolam, bank sampah, sanggar kesenian, bangku, <i>traffic mirror</i> , pendopo, gazebo, bangunan PAUD & Posyandu	Sarana pendukung kegiatan KRA sebagian besar kondisinya cukup baik, namun bangku dan peneduh disalahgunakan untuk menaruh perabot rumah tangga dan kendaraan, serta beberapa papan hak anak sudah pudar warnanya dan beberapa di corat-coret.

4.2.3 Perubahan Infrastruktur

Perubahan infrastruktur ini dilihat dengan mengacu pada kerangka waktu pelaksanaan program KRA yang dilaksanakan pada tahun 2011. Periode waktu ini digunakan sebagai pemisah untuk melihat perubahan yang terjadi karena pasca adanya KRA yang mampu menyentuh berbagai aspek, kondisi permukiman di RW 11 mengalami peningkatan yang signifikan. Program KRA juga mampu mendorong banyak pendanaan untuk masuk, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Jenis infrastruktur yang diamati secara garis besar dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu sarana permukiman, prasarana permukiman, fasilitas pendukung permukiman (berkaitan dengan sarana KRA), dan fasilitas sosial. Detail dari adanya perubahan tersebut dapat ditinjau pada Tabel 4.

Tabel 4. Perubahan Infrastruktur RW 11 Kampung Badran

Jenis Infrastruktur	Kerangka Waktu		Keterangan
	Sebelum KRA (<2011)	Sesudah KRA (>2011)	
Sarana Permukiman			
Masjid/Musala	√	√	Sarana permukiman dasar seperti masjid, pos ronda, balai RW, balai RT, dan PAUD dibangun secara swadaya oleh masyarakat dalam kurun waktu 2000–2010. Terdapat penambahan balai RT pada RT 47 yang mulai dibangun pada 2018.
Pos ronda	√	√	
Balai RW	√	√	
Balai RT	√	√	
Gedung PAUD	√	√	
RTH (taman & kolam renang)	-	√	
Toilet umum	√	√	Toilet umum dibangun sebelum adanya program KRA dan didukung oleh adanya program KOTAKU.
Prasarana Permukiman			
Sumur umum	√	√	Prasarana dasar permukiman telah ada sebelum adanya program KRA, namun mengalami revitalisasi pasca adanya program KRA seperti jaringan persampahan dan drainase.
Jaringan persampahan	√	√	
Jaringan perpipaan sumur umum	√	√	
Jaringan drainase	√	√	
Jaringan telekomunikasi	√	√	
Jaringan listrik	√	√	
PAM swadaya	-	√	PAM swadaya dibangun pasca adanya program KRA dan didukung oleh dana dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
Fasilitas Pendukung Permukiman			
<i>Traffic mirror</i>	-	√	Seluruh fasilitas pendukung permukiman dibangun pasca adanya program KRA. Hal ini turut meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan semakin lengkapnya fasilitas yang ada dan mendukung upaya pemenuhan hak anak.
Papan edukasi hak anak	-	√	
Papan edukasi umum	-	√	
Gapura kampung ramah anak	-	√	
Rambu-rambu jalur evakuasi	-	√	

Jenis Infrastruktur	Kerangka Waktu		Keterangan
	Sebelum KRA (<2011)	Sesudah KRA (>2011)	
Railing bantaran sungai	-	√	
Polisi tidur	-	√	
Pavingisasi jalan lingkungan	-	√	
Fasilitas Sosial			
Bank sampah	√	√	Bank sampah dibangun pada tahun 2009 oleh swadaya masyarakat.
Sanggar kesenian	-	√	Sanggar kesenian dan taman baca merupakan fasilitas yang dibangun pasca adanya program KRA. Taman baca ini dibangun menggantikan bangunan rumah bambu (perpustakaan mini) yang telah dinonaktifkan oleh pemiliknya (sektor swasta) pada tahun 2010.
Taman baca	-	√	

Dari tabel perubahan infrastruktur sebelum dan setelah pelaksanaan program KRA diatas, nampak beberapa perubahan yang terjadi terhadap sebagian merupakan infrastruktur vital yang semestinya dimiliki oleh suatu kawasan permukiman. Sebelumnya, RW 11 Kampung Badran tidak memiliki ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis maupun juga fungsi sosialisasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul dan berinteraksi. Setelah adanya program KRA, terdapat inisiasi dibangunnya ruang terbuka di bantaran Kali Winongo (sebelah barat RW 11 Kampung Badran) berupa taman *riverside* yang dilengkapi dengan gazebo, lapangan bermain, dan kolam renang, serta media menanam bunga.

"(...) Terwujudnya pembangunan taman ini merupakan kolaborasi antara masyarakat setempat, LSM Forum Komunikasi Winongo Asri, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dana pembangunan taman ini memakan anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 yang bersumber dari Pemkot Yogyakarta. Sebagai salah satu perwujudan klaster ramah anak, tujuan pembangunan taman ini adalah pengalihan aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, yang sebelumnya senang bermain di warnet tanpa adanya pengawasan ditakutkan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak. (...)" (Sularno, 2022).

Selain dimanfaatkan sebagai taman, bantaran Kali Winongo tersebut juga dibangun PAM swadaya Banyu Bening Winongo yang diinisiasi oleh Ketua RW 11 Kampung Badran demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air bersih serta upaya pemenuhan hak anak dalam memperoleh air minum yang sehat dan aman bagi kesehatan. Sumber air dari PAM swadaya ini memanfaatkan potensi mata air di sekitar Kali Winongo sebagai potensi lokal RW 11 Kampung Badran.

Terdapat fasilitas-fasilitas pendukung permukiman baru yang berubah di RW 11 Kampung Badran, terlebih yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak anak. Fasilitas tersebut diantaranya adalah *traffic mirror*, papan edukasi hak anak, papan edukasi umum, gapura kampung ramah anak, rambu-rambu jalur evakuasi, *railing* (pegangan bantaran sungai), polisi tidur, dan paving jalan lingkungan. Terdapat juga penambahan fasilitas sosial yang digunakan sebagai media aktualisasi diri dan pemanfaatan waktu luang masyarakat dengan kegiatan produktif, seperti dibangunnya sanggar kesenian dan taman baca.

5. KESIMPULAN

Peningkatan kualitas infrastruktur merupakan salah satu bentuk dari upaya perubahan permukiman. Program Kampung Ramah Anak (KRA) menjadi salah satu media dalam upaya perubahan permukiman yang tidak hanya mengatasi permasalahan fisik terkait permukiman kumuh tetapi juga permasalahan sosial di dalamnya, dan upaya memperjuangkan pemenuhan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KRA memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran. Peningkatan kualitas infrastruktur ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mengingat program KRA adalah program yang multisektor dan multiaktor.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mengenai (1) proses perubahan yang terjadi, (2) identifikasi persebaran, (3) identifikasi kondisi, dan (4) perubahan infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat di RW 11 Kampung Badran sudah lengkap. Adanya berbagai upaya peningkatan kualitas infrastruktur juga telah berhasil mengatasi permasalahan kekumuhan yang dihadapi oleh RW 11 Kampung Badran terutama terkait dengan indikator penyediaan sarana prasarana, kesehatan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.

Dalam proses peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran, masih terdapat beberapa kelemahan yang tersisa, seperti kepadatan bangunan yang masih relatif tinggi dan aksesibilitas yang cukup terbatas terutama bagi kendaraan roda empat. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dan mewujudkan RW 11 yang benar-benar tanpa kumuh dan layak huni, maka dapat dilakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi terhadap keteraturan dan kepadatan bangunan, pembangunan jalan inspeksi di bantaran Sungai Winongo sebagai upaya perawatan sungai, mitigasi bencana, dan penambahan ruang publik di RW 11 Kampung Badran.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, A., Soemitro, R. A. A., & Santoso, E. B. (2018). Analisis Penentuan Infrastruktur Prioritas pada Kawasan Kumuh Lingkungan Kerantil Kota Blitar. *Journal of Civil Engineering*, 33(2), 56. <https://doi.org/10.12962/j20861206.v33i2.4568>
- Brown, C., de Lannoy, A., McCracken, D., Gill, T., Grant, M., Wright, H., & Williams, S. (2019). Special Issue: Child-Friendly Cities. *Cities and Health*, 3(1–2), 1–7. <https://doi.org/10.1080/23748834.2019.1682836>
- Devas, N. (1981). Indonesia's Kampung Improvement Program: An Evaluative Case Study. *Ekistics*, 48(286), 19–36. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/43620193>
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*.
- Doxiadis, C. A. (1970). Ekistics, the Science of Human Settlements. *Science*, 170(3956), 393–404. <https://doi.org/10.1126/science.170.3956.393>
- Fransen, J., Hati, B., Nyumba, R., & van Tuijl, E. (2023). Community Vitality and Frugal Practices in Informal Settlements in Nairobi: Towards a Typology. *Cities*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104179>
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- Hariyani, S., Usman, F., & Kurniawan, E. B. (2018). Strategy of Urban Settlement Planning Through a Model of Public Service Facilities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 202(012011). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012011>
- Haryanto, N. (2013). Gun Jack, Legenda Preman dari Kampung Badran. *Tempo.co*. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/474689/gun-jack-legenda-preman-dari-kampung-badran>
- Hendrarto, R. M. (1997). Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota. *Makalah Diskusi Rutin Fakultas Ekonomi*, 4.
- Horton, P. B. (1999). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Kaseke, D., Pakasi, C. B. D., & Ngangi, C. R. (2017). Analisis Perencanaan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 13(1A), 101–108. <https://doi.org/10.35791/agrosoek.13.1a.2017.15156>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan*.
- Kovacic, Z., & Giampietro, M. (2017). Between Theory and Quantification: An Integrated Analysis of Metabolic Patterns of Informal Urban Settlements. *Energy Policy*, 100, 377–386. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.06.047>
- Kurniasih, S. (2007). Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petungkang Utara–Jakarta Selatan. *Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur*.
- Setyowati, Y. (2016). Tindakan Komunikatif Masyarakat “Kampung Preman” dalam Proses Pemberdayaan. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 16–32. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.96>
- Sibyan, I. A. (2020). Rethinking slum planning: A Comparative Study of Slum Upgrading Projects. *Journal of Regional and City Planning*, 31(1), 1–11. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.1.1>
- Silas, J. (1992). Government-Community Partnership in Kampung Improvement Programmes in Surabaya. *Environment and Urbanization*, 4(3), 33–41. <https://doi.org/10.1177/095624789200400204>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57–65. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularno, J. (2022). *Komunikasi Interpersonal*.
- Villagomez, E. (2018). *The Laws of Settlement*. Surrey: Kwantlen Polytechnic University.